

**Analisis Pembangunan Desa Berdasarkan Capaian Indeks Desa
Membangun di Kabupaten Serang**
***Analysis of Village Development Based on the Achievement of the
Village Building Index in Serang District***

Devi Triady Bachruddin

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Bani Adi Darma

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Serang dan untuk mengetahui permasalahan serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif berdasarkan data IDM yang diterbitkan oleh Kementerian Desa pada tahun 2015 dan 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan nilai IDM pada tahun 2018 di Kabupaten Serang tidak ada desa mandiri, tidak seperti data IDM pada tahun 2015 ada 3 desa mandiri. Desa maju telah menurun jumlahnya dari 20 di tahun 2015 menjadi 11 desa di tahun 2018. Telah terjadi peningkatan status desa berkembang yang semula 98 menjadi 138 desa. Jumlah desa tertinggal menurun dari 183 menjadi 166, dan desa sangat tertinggal dari 22 menjadi 11 desa pada tahun 2018. Nilai Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Kabupaten Serang berada di atas rata-rata nilai Provinsi Banten, tetapi nilai IKL mengalami penurunan dari 0,6288 (2015) menjadi 0,6163 (2018). Secara keseluruhan, nilai IDM Kabupaten Serang di bawah nilai Provinsi Banten. Jika kita melihat klasifikasi desa berdasarkan IDM, pencapaian nilai ini (0,5930) masih diklasifikasikan dalam klasifikasi desa tertinggal. Sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Serang perlu melakukan intervensi kebijakan bagi pemerintah desa untuk memiliki inisiatif perencanaan pembangunan di sektor yang dapat meningkatkan pencapaian IKL dan IKE.

Kata kunci: *Indeks Desa Membangun, Rekomendasi Kebijakan, Kabupaten Serang*

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of village status based on the Village Building Index (IDM) in Serang District and to find out the problems and provide policy recommendations to overcome these problems. This research is descriptive based on IDM data that has been published by the Village Ministries in 2015 and 2018. The results of the study show that based on IDM values in 2018 in the Serang District there is no Autonomous villages, unlike the IDM data in 2015 there are 3 Autonomous villages. The Advanced village has decreased in number from 20 in 2015 to 11 villages in 2018. There has been an increase

in the status of developing villages which were initially 98 to 138 villages. The number of disadvantaged villages has decreased from 183 become 166, and very disadvantage villages from 22 to 11 very disadvantaged villages in 2018. Environmental Resilience Index (IKL) and Economic Resilience Index (IKE) Serang Regency are above average the value of Banten Province, but a decrease in IKL value from 0.6288 (2015) to 0.6163 (2018). Overall, the IDM value of Serang Regency is below the value of Banten Province. If we look at the classification of villages based on IDM the achievement of this value (0.5930) is still classified in the classification of disadvantage villages. In accordance with the authority in Law number 6 of 2014, the Serang District Government needs to carry out policy interventions for the village government to have development planning initiatives in the sector that can improve IKL and IKE achievements.

Keywords: *Village Building Index, Policy Recommendations, Serang District*

A. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa telah memberikan ruang lebih bagi pemerintahan desa dibanding dengan masa sebelumnya. Pengambilan keputusan oleh komunitas desa dan berlangsung diluar pengaruh negara atau pemerintah merupakan faktor penting yang menjadi pembeda dengan tata kelola pemeritahan desa sebelumnya (Agusta, Tetiani dan Fujiartanto, 2014). Lebih lanjut Irawan (2017) menyebutkan bahwa lahirnya UU Desa memberikan wewenang bagi pemerintah desa untuk berinisiatif memutuskan kegiatan dan anggaran pembangunan. Desa sebagai unit administrasi pemerintahan terkecil memegang peranan penting dan diharapkan menjadi titik awal berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan perekonomian masyarakat (Pusdatin Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015). Pembangunan perdesaan dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah perdesaan dan perkotaan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi sebelumnya yang cenderung berorientasi pada wilayah perkotaan (Bappenas dan BPS, 2015).

Desa Membangun Indonesia dihadapkan pada kenyataan kemiskinan akibat rendahnya produktivitas masyarakat dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman desa (Kolopaking, 2011). Data Badan Pusat statistik menunjukkan bahwa wilayah desa adalah tempat di mana sebagian besar penduduk miskin tinggal. Untuk itu, ketersediaan data dan pengukuran dalam konteks ini sangat dibutuhkan, terutama pengembangan intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015). Berbagai program afirmatif dari pemerintah di dalam mewujudkan pembangunan desa mesti dilanjutkan dengan penghitungan capaian keberhasilan kemajuan pembangunan. Untuk mencapai tujuan itu beberapa lembaga pemerintah membuat penghitungan indikator dengan output kategorisasi desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai acuan data dasar mengukur pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan

Perdesaan yang berkelanjutan (Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016). Dengan indikator inilah maka desa dapat menjadikannya sebagai instrumen atau alat ukur capaian pembangunan desa, sehingga pada indikator mana yang dinilai belum maupun telah tercapai dapat diketahui (Setyobakti, 2017).

Penjelasan Permendes Nomor 2 Tahun 2016, memberikan kerangka pemikiran tentang pencapaian sasaran pembangunan Desa sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain untuk (a) menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian Desa; (b) menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa, (c) menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain. Melalui Indeks Desa Membangun status kemajuan dan kemandirian Desa tergambar dengan status

Desa Mandiri (atau bisa disebut sebagai Desa Sembada), Desa Maju (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada), Desa Berkembang (atau bisa disebut sebagai Desa Madya), Desa Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya) dan Desa Sangat Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pratama). Klasifikasi yang lebih luas dalam 5 jenis status Desa diperlukan untuk mengakomodir keragaman dan kedalaman isu-isu yang melekat di Desa. Seperti diketahui bersama, isu-isu Desa sejauh ini merupakan isu yang kompleks. Tantangannya adalah merepresentasikan kompleksitas itu ke dalam status, sehingga perumusan isu dan targeting (fokus dan lokus) lebih terarah dan terpusat. Alasan lain adalah menghindari moral hazard dalam mencapai sasaran pembangunan desa sehingga tidak mengulangi praktek-praktek pembangunan yang serba bias dan merugikan kehidupan Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. IDM didasarkan pada 3 (tiga) indeks tersebut dan dikembangkan lebih lanjut dalam 22 dimensi serta beberapa indikator sebagai turunannya. Lebih jelasnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Indeks Desa Membangun dan Dimensinya

IDM	Dimensi	
Indeks Ketahanan Sosial	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan, Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan, Jaminan Kesehatan
	Pendidikan	Akses Pendidikan Dasar dan Menengah, Akses Pendidikan Non Formal, Akses ke Pengatahuan
	Modal Sosial	Memiliki Solidaritas Sosial, Toleransi, Rasa Aman Penduduk, Kesejahteraan Sosial

	Permukiman	Rasa Aman Penduduk, Kesejahteraan Sosial, Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak, Akses ke Sanitasi, Akses ke Listrik, Akses Informasi dan Komunikasi
Indeks Ketahanan Ekonomi		Keragaman Produksi Masyarakat Desa, Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan, Akses Distribusi/Logistik, Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan Wilayah
Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan		Kualitas Lingkungan, Potensi/Rawan Bencana Alam

Sumber : Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, masing-masing Indeks pada IDM diturunkan dalam dimensi yang kemudian dijabarkan dalam indikator untuk mengukurnya. Hasil penghitungan indikator tersebut akan menghasilkan kategorisasi desa-desa yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang

dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2015 dan 2018 terlihat bahwa terdapat perubahan status desa yang ada di wilayah Provinsi Banten. Secara lengkap disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah kategori Desa di Provinsi Banten Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2015 dan 2018

No	Kabupaten	Status Desa Tahun 2015					Jumlah	Status Desa Tahun 2018					Jumlah
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1	Serang	3	20	98	183	22	326	0	11	138	166	11	326
2	Lebak	0	4	83	212	41	340	1	7	76	229	27	340
3	Pandeglang	1	13	98	175	39	326	1	11	126	157	31	326
4	Tangerang	0	16	117	105	8	246	0	21	180	45	0	246
	Jumlah	4	53	396	675	110	1238	2	50	520	597	69	1238

Sumber: (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)

Pada Tabel 2 diatas, terlihat bahwa pada tahun 2018 jika dibandingkan tahun 2015 terjadi penurunan yang drastis dalam jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju di Kabupaten Serang dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan dalam hal tingkat kemajuan dan kemandirian Desa. Sebagai wilayah yang dekat dengan perkotaan dan Ibu Kota Provinsi Banten, sudah seharusnya Kabupaten Serang dapat meningkatkan

status Desa menjadi lebih baik.

Status ketertinggalan desa adalah permasalahan yang harus ditangani secara sinergis baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten termasuk desa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014. Pada pasal 112 dan 113 UU tersebut, peran pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan desa. Di sisi lain, bagian penjelasan Undang-Undang ini menyebutkan bahwa meningkatnya

wewenang pemerintah desa untuk berinisiatif memutuskan kegiatan dan anggaran pembangunan atau dikenal sebagai kaidah “desa membangun” (Irawan, 2017). Dengan demikian kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan tidak lepas dari koridor desentralisasi dan otonomi desa.

Desentralisasi dan otonomi desa pada hakekatnya adalah memandirikan masyarakat dan desa yang ditujukan dengan terbentuknya efektifitas dan efisiensi pembiayaan pembangunan sesuai dengan kondisi dan keperluan desa, membangkitkan kepercayaan dan tanggung jawab masyarakat dan desa untuk berprakarsa memanfaatkan potensi desa bagi pencapaian kesejahteraan (Kolopaking, 2011;137). Efektifitas penggunaan dana desa yang diberikan pemerintah tentu harus bisa mengangkat derajat ketertinggalan desa di wilayah Provinsi Banten yang dicirikan dengan meningkatnya nilai IDM di masing-masing desa. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis perkembangan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Serang.

B. Metodologi

Penelitian ini bersifat deskriptif berdasarkan data IDM tahun 2015 dan tahun 2018 untuk masing-masing desa di wilayah Kabupaten Serang yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. selanjutnya dilakukan study literatur yang berhubungan dengan program pembangunan desa terkait upaya peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM).

C. Hasil dan Pembahasan

Ketertinggalan sebuah kabupaten dapat ditandai dengan banyaknya desa tertinggal di daerah tersebut, Bappenas dalam hal ini menggunakan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang membagi menjadi tiga tipologi yaitu Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Mandiri, sementara itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang membagi desa kedalam lima kategori yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri (Pusdatin Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2015).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2015, Kabupaten Serang memiliki nilai Indeks Desa Membangun sebesar 0,5861 dengan jumlah desa sebanyak 326 desa. Dari keseluruhan jumlah desa tersebut, jumlah desa mandiri sebanyak 3 desa (0,92%), jumlah desa maju sebanyak 20 desa (6,13%), jumlah desa berkembang sebanyak 98 desa (30,06%), jumlah desa tertinggal sebanyak 183 desa (56,13%), dan jumlah desa sangat tertinggal sebanyak 22 desa (6,75%). Sedangkan pada tahun 2018, nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Serang adalah 0,5930 dengan jumlah desa yang sama sebanyak 326 desa yang terdiri dari 11 desa maju (3,37%), 138 desa berkembang (42,33%), 166 desa tertinggal (50,92), 11 desa sangat tertinggal (3,37%), dan tidak ada lagi desa mandiri. Secara keseluruhan bahwa di Kabupaten Serang terjadi peningkatan jumlah desa berkembang sebesar 12,27% (40 desa) dan berkurangnya jumlah desa tertinggal dan

desa sangat tertinggal yaitu sebesar 5,21% (17 desa) untuk desa tertinggal dan 3,37% (11 desa) untuk desa sangat tertinggal. Peningkatan status desa tersebut tidak diikuti oleh peningkatan jumlah desa mandiri dan desa maju, pada tahun 2018 di Kabupaten Serang tidak ada lagi desa

mandiri, tidak seperti tahun 2015 yang terdapat 3 desa mandiri sedangkan untuk desa maju mengalami penurunan jumlah dari 20 desa di tahun 2015 menjadi 11 desa di tahun 2018. Secara lengkap disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah kategori Desa di Kabupaten Serang Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2015 dan 2018

No	Kecamatan	Jumlah Perkembangan Status Desa									
		Mandiri		Maju		Berkembang		Tertinggal		Sangat Tertinggal	
		2015	2018	2015	2018	2015	2018	2015	2018	2015	2018
1	Anyar			4	2	3	4	5	5		1
2	Bandung							7	8	1	
3	Baros					5	5	9	9		
4	Binuang					1	6	5	1	1	
5	Bojonegara					3	8	7	3	1	
6	Carenang						3	7	5	1	
7	Cikande			1		3	5	7	7	2	1
8	Cikeusal					6	13	11	4		
9	Cinangka	2		2	2	4	5	5	7	1	
10	Ciomas			2		5	7	4	4		
11	Ciruas			1		10	7	4	7		1
12	Gunung Sari					2	1	4	6	1	
13	Jawilan					5	6	3	3	1	
14	Kibin			1	4	4	5	4			
15	Kopo					1	4	8	6	1	
16	Kragilan					3	6	8	6	1	
17	Kramat Watu	1		6		4	13	4	1		1
18	Lebak Wangi							7	9	3	1
19	Mancak				1	4	3	10	9		1
20	Pabuaran						2	8	5		1
21	Padarincang					5	5	9	7		2
22	Pamarayan					2	2	7	8	1	
23	Petir			1	1	6	4	8	10		
24	Pontang			1		3	4	7	7		
25	Pulau Ampel			1		3	5	3	4	2	
26	Tanara					3	3	4	6	2	
27	Tirtayasa					3		8	13	3	1
28	Tunjung Teja					4	2	5	6		1
29	Waringin Kurung				1	6	10	5			
Jumlah		3	0	20	11	98	138	183	166	22	11

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 3, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Serang mencapai 62,88% (205 desa) pada tahun 2015 dan 54,29% (177 desa) pada tahun 2018 dari total seluruh desa yang ada (326 desa), namun Peraturan Presiden nomor 131 tahun 2015 tidak memasukan Kabupaten Serang dalam daftar daerah tertinggal. Penetapan daerah tertinggal didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal Secara Nasional, yang menyebutkan bahwa penetapan daerah tertinggal berdasarkan pada kriteria: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah,

aksesibilitas dan karakteristik daerah. Seluruh kriteria ini diturunkan dalam 27 indikator yang digunakan untuk menilai satu wilayah kabupaten secara keseluruhan bukan menilai desa.

Nilai Indeks Desa Membangun tersusun atas tiga yaitu Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Masing-masing nilai indeks memberikan kontribusi bobot yang sama dalam penentuan nilai IDM suatu desa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai IDM diperlukan langkah kebijakan yang tepat yang diwujudkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan capaian masing-masing indeks. Dibawah ini tersaji rata-rata nilai IDM untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Serang

Tabel 4. Nilai Indeks Desa Membangun untuk masing-masing Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2018

NO	KECAMATAN	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM
1	Anyar	0,6740	0,5431	0,5500	0,5890
2	Bandung	0,6464	0,4167	0,6084	0,5571
3	Baros	0,6559	0,4643	0,6191	0,5798
4	Binuang	0,6825	0,5595	0,6191	0,6204
5	Bojonegara	0,6859	0,5773	0,6242	0,6291
6	Carenang	0,7207	0,5208	0,5583	0,6000
7	Cikande	0,7090	0,4692	0,5821	0,5868
8	Cikeusal	0,6982	0,5010	0,6471	0,6154
9	Cinangka	0,6400	0,4873	0,6952	0,6075
10	Ciomas	0,7070	0,4911	0,6606	0,6196
11	Ciruas	0,6575	0,5222	0,6134	0,5977
12	Gunung Sari	0,6098	0,4024	0,6476	0,5533
13	Jawilan	0,7570	0,5729	0,6750	0,6683
14	Kibin	0,7435	0,6500	0,7111	0,7015
15	Kopo	0,6635	0,5433	0,5333	0,5801
16	Kragilan	0,6686	0,4903	0,6278	0,5956
17	Kramat Watu	0,6945	0,5367	0,6445	0,6252
18	Lebak Wangi	0,5823	0,3967	0,6067	0,5286
19	Mancak	0,6338	0,4262	0,6476	0,5692
20	Pabuaran	0,6393	0,4555	0,6084	0,5677
21	Padarincang	0,6347	0,4536	0,6095	0,5659
22	Pamarayan	0,6600	0,4733	0,5867	0,5733
23	Petir	0,6682	0,4878	0,6356	0,5972

24	Pontang	0,6556	0,5030	0,5877	0,5821
25	Pulau Ampel	0,6933	0,6037	0,5226	0,6065
26	Tanara	0,6679	0,5259	0,5259	0,5733
27	Tirtayasa	0,5774	0,4057	0,6276	0,5369
28	Tunjung Teja	0,5975	0,4537	0,6296	0,5603
29	Waringin Kurung	0,7351	0,6242	0,6546	0,6713

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (diolah)

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2018) diketahui bahwa nilai rata-rata IDM desa di Kabupaten Serang sebesar 0,5930. Walaupun secara keseluruhan nilai Indeks Desa Membangun

Kabupaten Serang mengalami kenaikan dari tahun 2015, akan tetapi untuk Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) mengalami penurunan. Selengkapnya tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Serang Tahun 2015 dan 2018

	IKL		IKE		IKS		IDM	
	2015	2018	2015	2018	2015	2018	2015	2018
Serang	0,6288	0,6163	0,4891	0,4981	0,6404	0,6645	0,5861	0,5930
Banten	0,6181	0,6127	0,4963	0,4946	0,6357	0,6783	0,5834	0,5952

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (diolah)

Pada Tabel 5, nilai IDM Kabupaten Serang mengalami peningkatan dari 0,5861 (2015) menjadi 0,5930 (2018). Jika melihat klasifikasi desa berdasarkan IDM, pencapaian nilai ini (0,5930) masih diklasifikasikan sebagai desa tertinggal. Kabupaten Serang dengan kewenangannya sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu mengintervensi kebijakan desa agar melahirkan inisiatif pembangunan sektor yang meningkatkan capaian indeks ekonomi dan lingkungan (IKL dan IKE). Sebagaimana pendapat Irawan (2017), lahirnya UU Desa memberikan wewenang pemerintah desa berinisiatif memutuskan kegiatan dan anggaran pembangunan, atau pendapat lainnya (Kolopaking, 2011) yang

menyebutkan kemandirian desa ditandai terbentuknya efektifitas dan efisiensi pembiayaan pembangunan sesuai kondisi dan keperluan desa, membangkitkan kepercayaan dan tanggung jawab masyarakat desa memanfaatkan potensi desa bagi pencapaian kesejahteraan.

Permasalahan yang harus menjadi perhatian dalam upaya pembangunan desa di wilayah Kabupaten Serang adalah nilai IKL yang mengalami penurunan dari 0,6288 (2015) menjadi 0,6163 (2018). Seperti dijelaskan sebelumnya, faktor penentu IKL adalah kualitas lingkungan, tingkat kerawanan bencana dan respon/tanggap bencana. Kualitas lingkungan dilihat dari tingkat pencemaran air, udara, tanah, dan limbah. Tingkat kerawanan bencana dilihat dari frekuensi

bencana banjir, longsor dan kebakaran (kekeringan) yang terjadi dalam 1 tahun, sedangkan respon/ tanggap bencana berkaitan dengan ada tidaknya peringatan dini, jalur evakuasi dan mitigasi bencana. Penurunan nilai IKL di Kabupaten Serang diakibatkan karena tingkat kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup atau pun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih rendah. Hal ini senada dengan ungkapan pendamping desa yang mengatakan bahwa “banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan lingkungan, seperti masih banyak yang buang sampah ke sungai sehingga terjadi pencemaran air dan tersumbatnya aliran sungai yang mengakibatkan banjir pada musim hujan”. Hal lain yang harus mendapat perhatian adalah masalah pemberian ijin usaha oleh pemerintah kabupaten. Pemberian ijin usaha hendaknya mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan sehingga proses pembangunan bisa berkelanjutan. Nilai indeks ketahanan lingkungan juga ditentukan dari potensi kebencanaan yang mungkin terjadi di desa. Untuk itu

diperlukan program kesiapsiagaan desa dalam menghadapi bencana. Pemerintah Kabupaten termasuk pemerintah desa perlu menyediakan anggaran agar program desa siaga dapat terimplementasi secara baik.

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan status desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Serang dibandingkan dengan tahun 2018. Telah terjadi peningkatan status desa maju di Kabupaten Serang yang semula 11 desa di tahun 2018 menjadi 44 desa pada tahun 2019. Peningkatan status desa juga terlihat dari jumlah desa berkembang, dari 138 desa di tahun 2018 menjadi 241 desa berkembang pada tahun 2019. Peningkatan status desa tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Serang. Pada tahun 2018, Kabupaten Serang memiliki 166 desa tertinggal dan 11 desa sangat tertinggal, sedangkan pada tahun 2019 menjadi 39 desa tertinggal dan tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Kabupaten Serang. Secara lengkap disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Jumlah kategori Desa di Kabupaten Serang Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2018 dan 2019

	Kecamatan	Jumlah Perkembangan Status Desa									
		Mandiri		Maju		Berkembang		Tertinggal		Sangat Tertinggal	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Anyar		1	2	2	4	7	5	2	1	
2	Bandung						6	8	2		
3	Baros				3	5	11	9			
4	Binuang					6	7	1			
5	Bojonegara				4	8	6	3	1		
6	Carenang				1	3	5	5	2		
7	Cikande					5	10	7	3	1	
8	Cikeusal				3	13	14	4			
9	Cinangka			2	2	5	12	7			
10	Ciomas					7	9	4	2		
11	Ciruas				2	7	13	7		1	
12	Gunung Sari				1	1	5	6	1		

13	Jawilan				1	6	8	3			
14	Kibin		1	4	5	5	3				
15	Kopo					4	10	6			
16	Kragilan				4	6	8	6			
17	Kramat Watu				5	13	10	1		1	
18	Lebak Wangi						6	9	4	1	
19	Mancak			1	1	3	11	9	2	1	
20	Pabuaran				1	2	7	5		1	
21	Padarincang					5	14	7		2	
22	Pamarayan				1	2	8	8	1		
23	Petir			1	3	4	10	10	2		
24	Pontang				1	4	7	7	3		
25	Pulau Ampel				2	5	6	4	1		
26	Tanara					3	8	6	1		
27	Tirtayasa						2	13	12	1	
28	Tunjung Teja					2	9	6		1	
29	Waringin Kurung			1	2	10	9				
Jumlah		0	2	11	44	138	241	166	39	11	0

Sumber: Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah desa tertinggal di Kabupaten Serang pada tahun 2019 mencapai 11,96% (39 desa) dari total seluruh desa yang ada (326 desa). Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Serang pada tahun 2019 sebesar 0,5930 dengan nilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,6645, nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,4981 dan nilai Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,6163. Berdasarkan ketiga nilai indeks tersebut, karena nilai IKE lebih kecil dari nilai IKS dan IKL maka nilai IKE Kabupaten Serang harus menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan nilai IKE Kabupaten Serang pada tahun 2019 sebesar 0,4981 masih masuk kategori desa tertinggal jika melihat klasifikasi desa berdasarkan IDM.

Terdapat 11 (sebelas) indikator dalam penentuan nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), yaitu:

- 1) Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk

- 2) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen)
- 3) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket)
- 4) Terdapat kantor pos dan jasa logistik
- 5) Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta)
- 6) Akses penduduk ke kredit
- 7) Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)
- 8) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan
- 9) Terdapat moda (Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi)
- 10) Jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih
- 11) Kualitas Jalan Desa (jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah)

Oktaviana (2017) menyebutkan, untuk meningkatkan nilai IKE, beberapa kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan lokus

wilayah desa harus diarahkan pada peningkatan keragaman produksi masyarakat desa, penyediaan pusat pelayanan perdagangan, peningkatan akses distribusi/logistik, peningkatan akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, pembentukan lembaga ekonomi seperti koperasi, serta penyediaan infrastruktur untuk menunjang keterbukaan wilayah seperti pembangunan jalan desa atau penghubung desa dan pemenuhan moda transportasi antar desa. Peningkatan nilai IKE Kabupaten Serang dari 0,4891 (2015) menjadi 0,4981 (2018) memperlihatkan bahwa makin bertambahnya beberapa pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang seperti industri, jumlah pasar, toko, warung, Koperasi Desa atau Bumdes dan lembaga ekonomi lain. Muhtarom,dkk (2018) yang menyebutkan bahwa keseimbangan pembangunan wilayah terjadi ketika antara wilayah pusat perdagangan dan wilayah pinggiran mampu bersinergi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, dengan adanya beberapa pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang maka pembangunan wilayah akan semakin merata.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian nilai IDM Kabupaten Serang sebesar 0,5930 masih diklasifikasikan dalam klasifikasi desa tertinggal. Permasalahan yang harus menjadi perhatian dalam upaya pembangunan desa di wilayah Kabupaten Serang adalah nilai IKL dan IKE. Nilai IKL Kabupaten Serang mengalami penurunan dari 0,6288 (2015) menjadi 0,6163 (2018), selanjutnya nilai IKE Kabupaten Serang pada tahun 2018 sebesar 0,4981 masih

masuk kedalam kategori desa tertinggal jika melihat klasifikasi desa berdasarkan IDM. Sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Serang perlu melakukan intervensi kebijakan bagi pemerintah desa untuk memiliki inisiatif perencanaan pembangunan di sektor yang dapat meningkatkan pencapaian IKL dan IKE.

Daftar Pustaka

Buku

- Agusta Ivanovich, Ani Tetiani dan Fujiartanto. 2014. Teori dan Kebijakan Desa Untuk Indonesia. Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. 13-32.
- Bappenas dan BPS. (2015). *Indek Pembangunan Desa 2014*. Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasiona/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik.
- Irawan, Nata (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 382 hlm.
- Kementerian Desa. *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*. (2015). *Indeks Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. 2015. *Buku Data dan Informasi Penyiapan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Jakarta.

Jurnal

Muhtarom, Nurhadi Kusuma dan Eri Purwanti. 2018. Analisis Indeks Desa Membangun Untuk Mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa Di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Inovasi Pembangunan—Jurnal Kelitbangan Vol. 06 No. 02. Hal 179-190.

Setyobakti, H. M. 2017. Identifikasi masalah dan potensi desa berbasis indek desa membangun (IDM) di desa gondowangi kecamatan wagir kabupaten malang. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA, 7, 1–14.

Dokumen

Kolopaking, L.M. 2011. Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Struktur Kelembagaan Otonomi Desa. Menuju Desa 2030. Crestpent Press Kantor Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB, Bogor. 133-146.

Oki Oktaviana dan Devi Triady Bachruddin. 2017. Upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Provinsi Banten Melalui Intervensi Kebijakan Pemerintah Provinsi. Prosiding Seminar Nasional Pengembangan.

Kawasan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. Laboratorium Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2017. Hal 31-45.

Sjafari, Agus dkk. 2019. Upaya Pengentasan Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Provinsi Banten. Laporan Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten bekerjasama dengan LPPM STIA Banten.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal Secara Nasional.